



**PERAN BADAN EKONOMI KREATIF (BEKRAF) SEBAGAI AGEN SOFTPOWER INDONESIA STUDI  
KASUS : PROGRAM DOCS BY  
THE SEA**

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Rifqie Zullian, Drs. Usmar Salam, M.I.S.  
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**INTISARI**

Ekonomi kreatif seringkali digunakan sebagai medium untuk membangun dan/atau memperkuat *softpower* suatu negara. Hollywood milik Amerika Serikat dan K-Drama milik Korea Selatan telah menunjukkan dampak yang cukup signifikan pada perpolitikan masing-masing negara. Pada sisi lain Indonesia dewasa ini mulai ikut serta membangun dan mengembangkan sektor Ekonomi Kreatif miliknya. Semenjak pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, didirikan sebuah lembaga resmi pemerintah di luar kementerian. Badan ini bernama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), sebuah badan setingkat kementerian yang bertugas untuk mengembangkan sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, tentang bagaimana peran BEKRAF sebagai agen *softpower* bagi Indonesia. Terlebih salah satu program BEKRAF yaitu Docs by the Sea, berinteraksi langsung dengan masyarakat di Asia Tenggara hingga Amerika. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengambil program Docs by the Sea sebagai studi kasus. Penulis berargumen bahwa BEKRAF telah berperan bagi *softpower* Indonesia. Secara spesifik adalah dengan menciptakan alat diplomasi publik (*powersource softpower*) yaitu forum film dokumenter internasional Docs by the Sea. Hal tersebut dinilai melalui tiga parameter utama yang terdiri dari ; (1) Kesesuaian Docs by the Sea dengan Kebijakan Luar Negeri Indonesia, (2) Diplomasi Digital BEKRAF sebagai forum Docs by the Sea, dan (3) Kerjasama BEKRAF dengan jaringan INGO dalam Docs by the Sea. Dua dari Tiga parameter tersebut telah menunjukkan korelasi positif antara Peran BEKRAF dengan penciptaan *softpower* bagi Indonesia. Meskipun begitu, penulis tidak menafikkan bahwa masih terdapat ruang bagi BEKRAF untuk mengoptimalkan program Docs by the Sea agar menjadi alat diplomasi publik yang lebih efektif bagi Indonesia.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

PERAN BADAN EKONOMI KREATIF (BEKRAF) SEBAGAI AGEN SOFTPOWER INDONESIA STUDI  
KASUS : PROGRAM DOCS BY  
THE SEA

Rifqie Zullian, Drs. Usmar Salam, M.I.S.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**ABSTRACT**

*Creative economy has often been utilized as a medium to build and/or strengthen softpower of a nation. Hollywood from United States and K-drama from South Korea has shown many impact toward the political power in their respective nation. On the other hand, these day, Indonesian government start to give more attention to build and develop their creative economy sector. It is since the governance of President Joko Widodo, Indonesian government officially establish a body outside Ministreal level to manage and develop Indonesian creative economy sector. The body is called Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). Therefore it is become a question about, How is the role of BEKRAF as an agent of softpower for Indonesia. Especially one of the programme which BEKRAF initiated, called Docs by the Sea is directly interact with the people from South East Asia to America. This research is using qualitative method with Docs by the Sea as the case study. The writer argue that BEKRAF does have a role to Indonesian softpower. Specifically their role on creating tool for public diplomacy (powersource softpower) which establish and run an international documentary movie forum Docs by the Sea. This argument is assessed under three parameters consist of; (1) The compatibility of Docs by the Sea with Indonesian foreign policy, (2) BEKRAF digital diplomacy as a forum of Docs by the Sea, (3) BEKRAF cooperation with the web of INGO under the Docs by the Sea. Two third of the parameters shown a possitive corelation between the role of BEKRAF with Indonesian (powersource) softpower. Even so, the writer believe that there is some space of improvements for BEKRAF to optimalized Docs by the Sea programme and to become a more effective tool of public diplomacy for Indonesia.*